CITACONOMIA : Economic and Business Studies

Volume 5 No.2
ISSN: 2963-492x
The article is published with OpenAccess at:
https://ejournal.citakonsultindo.or.id/index.php/CITACONOMIA/indexdex

ANALISIS EFEKTIVITAS KOMUNIKASI KRISIS MELALUI PRESS RELEASE PADA KASUS DUGAAN PELECEHAN SEKSUAL DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA

Jefferson Christofal Bintang Nugroho[1], Vilda Mutiara Lyoni[2], Fatma Rustika[3], Mahir Septiyani[4], Naufal Athiya primananda[5]
[12345] Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Email : jejeee.christ@gmail.com

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas press release sebagai bentuk komunikasi krisis dalam merespons kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis berita dan studi literatur dari jurnal komunikasi krisis, public relations, dan press release. Hasil penelitian menunjukkan bahwa press release memiliki peran penting dalam menyampaikan klarifikasi kepada publik, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh kejelasan pesan, transparansi informasi, responsivitas, dan kredibilitas komunikasi yang disampaikan oleh institusi. Selain itu, dinamika media digital dan tekanan publik turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap komunikasi yang dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan strategi komunikasi krisis melalui press release di era digital.*

Kata Kunci: *public relations, press release, komunikasi krisis, efektivitas komunikasi*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah secara signifikan mengubah pola komunikasi organisasi, khususnya dalam praktik public relations yang semakin bergantung pada media online sebagai sarana utama penyebaran informasi. Transformasi ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan media sosial, portal berita digital, serta berbagai platform komunikasi yang memungkinkan penyebaran informasi cepat dan luas tanpa batas geografis. Dalam konteks tersebut, organisasi tidak lagi hanya berkomunikasi melalui media konvensional, tetapi juga dituntut untuk mampu beradaptasi dengan dinamika komunikasi digital yang bersifat real-time, interaktif, dan terbuka (Lattimore et al., 2021).

Perubahan ekosistem komunikasi ini juga membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kompleksitas dalam pengelolaan isu publik. Informasi yang beredar di ruang digital tidak selalu berasal dari sumber resmi, melainkan juga dari pengguna media sosial yang memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik secara cepat. Kondisi ini menyebabkan organisasi menghadapi tantangan dalam mengendalikan arus informasi, terutama ketika terjadi krisis yang dapat memengaruhi reputasi. Oleh karena itu, komunikasi

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

krisis menjadi aspek yang sangat penting dalam strategi komunikasi organisasi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan mampu menjaga kepercayaan publik serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan (Coombs, 2007).

Komunikasi krisis pada dasarnya merupakan proses strategis yang dilakukan oleh organisasi dalam merespons situasi yang berpotensi merusak citra, legitimasi, dan hubungan dengan publik. Dalam praktiknya, komunikasi krisis tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi secara faktual, tetapi juga mencakup upaya membangun persepsi positif melalui pesan yang jelas, transparan, responsif, dan kredibel. Keempat aspek tersebut menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas komunikasi krisis karena berkaitan langsung dengan bagaimana publik memahami, menilai, dan merespons informasi yang disampaikan oleh organisasi (Coombs, 2007; Parsons, 2023).

Salah satu instrumen utama yang digunakan dalam komunikasi krisis adalah *press release. Press release* berfungsi sebagai media komunikasi resmi yang memungkinkan organisasi menyampaikan informasi secara terstruktur kepada publik maupun media massa. Dalam konteks digital, peran *press release* tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi satu arah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi komunikasi yang lebih luas dalam membentuk narasi publik serta menjaga konsistensi pesan organisasi di berbagai platform (Lattimore et al., 2021).

Namun demikian, efektivitas *press release* dalam komunikasi krisis tidak selalu berjalan optimal. Lingkungan digital yang dinamis sering kali menyebabkan informasi berkembang lebih cepat dibandingkan dengan respons resmi dari organisasi. Hal ini dapat memunculkan kesenjangan informasi yang kemudian diisi oleh spekulasi, opini, maupun informasi yang belum terverifikasi. Ketika organisasi tidak mampu merespons secara cepat dan tepat, potensi terjadinya misinformasi dan penurunan kepercayaan publik akan semakin besar (Parsons, 2023).

Fenomena tersebut dapat diamati pada kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kasus ini menjadi perhatian luas masyarakat karena berkembang secara viral di media sosial sebelum adanya klarifikasi resmi dari pihak institusi. Informasi awal yang beredar cenderung bersifat parsial dan tidak terverifikasi, sehingga memunculkan berbagai persepsi publik yang beragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi menghadapi tantangan besar dalam mengelola komunikasi krisis di era digital, terutama dalam mengendalikan narasi yang berkembang secara tidak terpusat.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Lebih lanjut, berbagai pemberitaan media menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya menjadi isu internal institusi, tetapi juga berkembang menjadi isu publik yang melibatkan berbagai pihak eksternal, seperti pemerintah dan lembaga pendidikan. Keterlibatan berbagai aktor ini menunjukkan bahwa komunikasi krisis tidak dapat dipandang sebagai proses yang bersifat internal semata, melainkan sebagai bagian dari dinamika komunikasi publik yang lebih luas. Dengan demikian, organisasi dituntut untuk mampu menyusun strategi komunikasi yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada pengelolaan hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas komunikasi krisis dan penggunaan press release dalam konteks organisasi, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana efektivitas komunikasi krisis dianalisis dalam konteks kasus yang berkembang secara viral di media digital, khususnya yang melibatkan institusi pendidikan. Selain itu, penelitian yang mengkaji komunikasi krisis dengan menggunakan indikator kejelasan, transparansi, responsivitas, dan kredibilitas dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi masih relatif terbatas (Coombs, 2007; Lattimore et al., 2021).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas komunikasi krisis melalui *press release* dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui data pemberitaan media serta didukung oleh teori komunikasi krisis dan *public relations*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam memahami bagaimana organisasi mengelola komunikasi krisis di era digital serta implikasinya terhadap pembentukan kepercayaan publik.

KAJIAN PUSTAKA

Komunikasi Krisis

Komunikasi krisis adalah proses penyampaian informasi oleh suatu organisasi ketika menghadapi situasi yang berpotensi mengancam operasional, legitimasi, atau reputasinya. Situasi krisis sering kali menyebabkan ketidakpastian dan menciptakan perhatian besar dari publik, sehingga organisasi perlu menerapkan komunikasi yang efektif untuk mengelola persepsi masyarakat dan meminimalkan dampak negatif yang mungkin muncul. Menurut Coombs (2007), komunikasi krisis memiliki peran yang krusial dalam memberikan informasi yang diperlukan kepada para pemangku kepentingan, mengurangi ketidakpastian, serta melindungi reputasi organisasi selama masa krisis.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

Di era organisasi modern, komunikasi krisis tidak hanya berfungsi sebagai saluran untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai cara untuk membangun kepercayaan di kalangan publik. Dengan cepatnya penyebaran informasi melalui media digital, organisasi dituntut untuk mampu memberikan respons yang cepat, tepat, dan konsisten. Kegagalan dalam mengelola komunikasi krisis dapat mengakibatkan perkembangan yang tidak menguntungkan.

Press Release sebagai Instrumen Komunikasi Krisis

Press release adalah salah satu jenis komunikasi resmi yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menginformasikan kepada publik dan media. Dalam hubungan masyarakat, *press release* berfungsi sebagai sarana untuk memberikan penjelasan, menyampaikan kebijakan, dan mengarahkan cara pandang publik terhadap sebuah kejadian. Menurut Al Zuhri et al. (2024), *press release* yang efektif harus memenuhi prinsip kejelasan, ketepatan, dan kelengkapan informasi agar bisa dipahami dengan baik oleh masyarakat. Dalam situasi krisis, *press release* menjadi alat penting untuk mengurangi kebingungan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap organisasi.

Penelitian Putranto et al. (2023) menunjukkan bahwa memiliki peran strategis dalam komunikasi krisis karena mampu menjadi sumber informasi resmi yang dapat bersaing dengan informasi yang belum terverifikasi di dunia digital. Selain itu, Afifah dan Yusalina (2026) menekankan bahwa pengelolaan berita melalui humas sangat penting untuk menjaga citra perusahaan, terutama dalam keadaan krisis yang menarik perhatian banyak orang.

Efektivitas Komunikasi Krisis melalui Press Release

Efektivitas komunikasi krisis merujuk pada kemampuan sebuah organisasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat agar pesan tersebut bisa dimengerti, diterima, dan dipercaya selama masa krisis terjadi. Menurut Lattimore et al. (2021), komunikasi krisis yang berhasil tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga membantu organisasi mempertahankan kepercayaan publik serta mengurangi dampak negatif pada reputasi. Dalam situasi krisis, *press release* merupakan salah satu cara resmi yang dipakai organisasi untuk menyampaikan informasi secara teratur dan terkendali kepada masyarakat.

Efektivitas komunikasi krisis lewat *press release* dapat dievaluasi dengan beberapa indikator. Pertama, kejelasan informasi, yang berarti kemampuan organisasi untuk

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

menyampaikan pesan yang mudah dimengerti, teratur, dan tidak membingungkan (Coombs, 2007). Kedua, transparansi informasi yang menunjukkan betapa terbukanya organisasi dalam memberikan informasi yang relevan, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Parsons, 2023). Ketiga, responsivitas komunikasi, yaitu seberapa cepat dan tepat organisasi memberikan tanggapan terhadap perkembangan krisis sehingga bisa mengurangi kebingungan informasi di masyarakat (Coombs, 2019). Keempat, kredibilitas informasi berkaitan dengan seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan oleh organisasi berdasarkan konsistensi pesan, ketepatan informasi, dan kesesuaian antara komunikasi dan tindakan organisasi (Lattimore et al., 2021).

Keempat indikator ini digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi efektivitas komunikasi krisis melalui *press release* dalam penelitian ini. Semakin jelas, terbuka, responsif, dan kredibel informasi yang diberikan, semakin baik pula efektivitas komunikasi krisis yang dilaksanakan oleh organisasi dalam menjaga kepercayaan publik selama menghadapi krisis.

Reputasi Kelembagaan dalam Komunikasi Krisis

Reputasi kelembagaan adalah pandangan masyarakat mengenai keandalan dan moralitas suatu organisasi. Fombrun (1996) mengemukakan bahwa reputasi merupakan sumber daya penting yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan dan dukungan dari para pemangku kepentingan. Dalam kondisi krisis, reputasi lembaga dapat terpengaruh jika organisasi tersebut tidak mampu mengelola komunikasi dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi krisis melalui *press release* tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai upaya untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut (Coombs, 2019). Dengan kata lain, efektivitas komunikasi krisis dapat membantu menjaga reputasi kelembagaan di tengah situasi krisis (Sinko, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena komunikasi krisis yang terjadi di ruang publik digital, khususnya dalam konteks penggunaan *press release* sebagai respons organisasi terhadap isu yang berkembang di masyarakat (Creswell & Creswell, 2018).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada kasus dugaan

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis fenomena secara kontekstual dan mendalam, serta memahami dinamika komunikasi yang terjadi dalam situasi krisis tertentu.

Lokasi penelitian tidak terbatas pada ruang fisik tertentu, melainkan pada ruang digital sebagai media utama penyebaran informasi. Hal ini disebabkan oleh kasus yang diteliti berkembang melalui media sosial dan media online, sehingga analisis difokuskan pada konten komunikasi yang beredar di platform digital.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai pemberitaan media online, seperti BBC Indonesia, Kompas TV, Suara.com, dan JPNN, yang relevan dengan kasus yang diteliti. Selain itu, data juga diperoleh dari dokumen serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan komunikasi krisis, *public relations*, dan *press release* sebagai landasan teoritis penelitian (Lattimore et al., 2021; Parsons, 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berita, kronologi kasus, serta pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh institusi terkait. Sementara itu, studi literatur dilakukan untuk memperoleh landasan teoretis yang digunakan dalam menganalisis fenomena yang diteliti (Creswell & Creswell, 2018).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan pesan komunikasi yang terdapat dalam data yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan mengacu pada empat indikator utama, yaitu kejelasan, transparansi, responsivitas, dan kredibilitas, yang digunakan sebagai kerangka untuk menilai efektivitas komunikasi krisis yang dilakukan oleh organisasi.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan model analisis data Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Tahapan ini digunakan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis tersusun secara sistematis dan menghasilkan temuan yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kejelasan informasi (*Clarity*)

Kejelasan informasi merupakan aspek fundamental dalam komunikasi krisis

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

karena menentukan sejauh mana pesan yang disampaikan oleh organisasi dapat dipahami secara tepat oleh publik. Dalam perspektif komunikasi krisis, kejelasan tidak hanya berkaitan dengan penyampaian fakta, tetapi juga mencakup kelengkapan, konsistensi, serta struktur pesan yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi (Coombs, 2007). Dalam lingkungan komunikasi digital yang bersifat cepat dan terbuka, tuntutan terhadap kejelasan menjadi semakin tinggi karena publik menerima informasi dari berbagai sumber secara simultan. Oleh karena itu, organisasi dituntut untuk mampu menyampaikan informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga terstruktur dan mudah dipahami agar dapat mengurangi ketidakpastian yang muncul di publik.

Dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kejelasan informasi menjadi isu utama karena informasi awal yang berkembang di publik berasal dari media sosial sebelum adanya klarifikasi resmi dari institusi. Pemberitaan dari Kompas TV dan Suara.com menunjukkan bahwa kronologi kasus disampaikan secara bertahap dengan penekanan yang berbeda, sehingga menghasilkan narasi yang tidak sepenuhnya seragam. Perbedaan *framing* antarmedia ini menyebabkan publik harus menggabungkan berbagai informasi untuk memahami keseluruhan situasi, yang pada akhirnya membuka ruang bagi munculnya interpretasi yang beragam.

Upaya klarifikasi yang dilakukan oleh pihak Universitas Indonesia melalui pernyataan resmi menunjukkan adanya respons terhadap isu yang berkembang. Namun demikian, informasi yang disampaikan masih bersifat umum dan belum mencakup detail yang dibutuhkan publik secara spesifik, seperti kronologi lengkap, mekanisme penanganan, serta langkah konkret yang diambil oleh institusi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara informasi yang disediakan oleh organisasi dan kebutuhan informasi publik, sehingga berpotensi meningkatkan ketidakpastian serta mendorong publik untuk mencari sumber informasi alternatif.

Dengan demikian, kejelasan informasi dalam kasus ini masih belum optimal. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perbedaan narasi antarmedia, keterbatasan informasi dalam pernyataan resmi, serta belum terbangunnya pesan yang terstruktur dan konsisten dari organisasi. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi krisis, organisasi perlu menyampaikan informasi secara lebih komprehensif, konsisten, dan mudah dipahami, sehingga mampu membangun pemahaman publik yang lebih akurat serta mengurangi potensi misinterpretasi.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

2. Transparansi Informasi (*Transparency*)

Transparansi informasi merupakan elemen penting dalam komunikasi krisis yang berkaitan dengan keterbukaan organisasi dalam menyampaikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dalam perspektif komunikasi, transparansi tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi secara terbuka, tetapi juga mencakup kemampuan organisasi dalam menjelaskan proses, kebijakan, serta langkah-langkah konkret yang diambil dalam menangani suatu permasalahan (Parsons, 2023). Transparansi yang optimal dapat meningkatkan kepercayaan publik, sedangkan keterbatasan dalam keterbukaan informasi berpotensi menimbulkan persepsi negatif serta memperbesar ketidakpastian di masyarakat.

Dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, transparansi menjadi isu yang cukup menonjol karena publik tidak hanya membutuhkan klarifikasi, tetapi juga penjelasan yang lebih mendalam terkait proses penanganan kasus. Pemberitaan dari BBC Indonesia menunjukkan bahwa kasus ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, sementara pernyataan dari DPR menegaskan bahwa penanganan kasus tidak cukup dilakukan secara internal, melainkan memerlukan keterbukaan yang lebih besar kepada publik. Hal ini menunjukkan adanya tekanan eksternal terhadap organisasi untuk meningkatkan transparansi dalam komunikasi yang dilakukan.

Di sisi lain, pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak Universitas Indonesia menunjukkan adanya pengakuan terhadap kasus serta komitmen untuk melakukan penanganan. Namun demikian, jika dianalisis lebih lanjut, informasi yang disampaikan masih terbatas pada pernyataan normatif dan belum memberikan penjelasan rinci mengenai tahapan penanganan, mekanisme investigasi, serta perkembangan kasus secara berkelanjutan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan informasi publik.

Dengan demikian, transparansi komunikasi dalam kasus ini masih belum optimal. Organisasi perlu meningkatkan keterbukaan informasi dengan tetap mempertimbangkan aspek etika dan privasi, sehingga mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik. Transparansi yang baik tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi, tetapi juga sebagai strategi dalam membangun kepercayaan serta mengurangi spekulasi yang dapat memperburuk situasi krisis.

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

3. Responsivitas Komunikasi (*Responsiveness*)

Responsivitas komunikasi mengacu pada kemampuan organisasi dalam merespons krisis secara cepat, tepat, dan relevan terhadap dinamika informasi yang berkembang di publik. Dalam teori komunikasi krisis, kecepatan respons menjadi faktor kunci karena dapat menentukan arah persepsi publik serta memengaruhi perkembangan isu yang terjadi (Coombs, 2007). Respons yang cepat memungkinkan organisasi untuk mengendalikan narasi, sedangkan respons yang lambat dapat membuka ruang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat.

Dalam kasus ini, isu dugaan pelecehan seksual berkembang secara cepat di media sosial sebelum adanya pernyataan resmi dari pihak institusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa organisasi belum sepenuhnya mampu merespons krisis secara proaktif, sehingga publik lebih dahulu membentuk persepsi berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Hal ini menjadi indikator bahwa responsivitas komunikasi dalam tahap awal krisis masih belum optimal.

Meskipun organisasi telah memberikan respons melalui pernyataan resmi, jika dilihat dari aspek timing dan substansi, respons tersebut masih cenderung bersifat reaktif. Informasi yang disampaikan belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran publik secara langsung, sehingga tidak mampu meredam perkembangan isu secara signifikan. Selain itu, adanya tekanan dari publik dan pihak eksternal menunjukkan bahwa respons yang diberikan belum dianggap memadai dalam mengatasi krisis yang terjadi.

Dengan demikian, responsivitas komunikasi dalam kasus ini masih perlu ditingkatkan, baik dari segi kecepatan maupun relevansi pesan yang disampaikan. Organisasi perlu mengembangkan strategi komunikasi yang lebih proaktif agar dapat merespons isu secara lebih cepat dan tepat, sehingga mampu mengendalikan arus informasi serta meminimalkan dampak negatif terhadap reputasi.

4. Kredibilitas Informasi (*Credibility*)

Kredibilitas informasi merupakan aspek penting dalam komunikasi krisis yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan publik terhadap pesan yang disampaikan oleh organisasi. Dalam perspektif public relations, kredibilitas tidak hanya ditentukan oleh isi pesan, tetapi juga oleh konsistensi, keakuratan, serta kesesuaian antara komunikasi dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi (Lattimore et al., 2021). Kredibilitas yang tinggi dapat memperkuat kepercayaan publik, sedangkan kredibilitas yang rendah dapat

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a
Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

memperburuk citra organisasi di mata masyarakat.

Dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kredibilitas informasi menjadi tantangan karena publik menerima informasi dari berbagai sumber dengan sudut pandang yang berbeda. Pemberitaan media, pernyataan resmi, serta respons dari pihak eksternal menunjukkan adanya perbedaan penekanan informasi yang dapat memengaruhi persepsi publik. Selain itu, dominasi informasi dari media sosial pada tahap awal juga berkontribusi terhadap terbentuknya opini publik sebelum adanya klarifikasi resmi.

Ketidakkonsistenan informasi serta keterbatasan detail dalam komunikasi resmi dapat menimbulkan keraguan publik terhadap kredibilitas organisasi. Dalam situasi krisis, kondisi ini dapat memperburuk citra organisasi serta menurunkan tingkat kepercayaan publik. Oleh karena itu, organisasi perlu memastikan bahwa informasi yang disampaikan bersifat akurat, konsisten, dan didukung oleh tindakan nyata yang dapat diverifikasi oleh publik. Dengan demikian, kredibilitas informasi dalam kasus ini masih belum optimal dan memerlukan penguatan melalui peningkatan kualitas komunikasi yang lebih transparan dan konsisten. Organisasi perlu membangun komunikasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mampu menunjukkan komitmen nyata dalam menangani krisis, sehingga dapat membangun kembali kepercayaan publik secara berkelanjutan.

5. **Perspektif Ekonomi Reputasi Kelembagaan dalam Press Release**

Selain keempat indikator efektivitas komunikasi krisis di atas, kasus ini dapat pula ditinjau dari perspektif ekonomi kelembagaan, mengingat reputasi merupakan aset tidak berwujud yang menentukan kemampuan perguruan tinggi dalam menjaga kepercayaan mahasiswa, tenaga akademik, mitra riset, serta pemangku kepentingan lainnya (Fombrun, 1996; North, 1990). Dalam kerangka ini, *press release* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk melindungi dan merekonstruksi nilai ekonomi reputasi institusi di tengah tekanan publik.

Analisis *framing* terhadap rangkaian pernyataan resmi FH UI dan UI menunjukkan tiga hal yang tampak melalui pernyataan yang mengecam keras perilaku pelaku dan menegaskan bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik. Frame ini berfungsi sebagai strategi *defensive positioning,* yaitu

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

memisahkan identitas institusi dari perilaku individu pelaku sehingga dampak negatif terhadap reputasi dapat diminimalkan (Entman, 1993; Coombs, 2019)

Kedua, frame prosedural *due process* ditandai dengan penekanan pada penanganan kasus yang bertahap, objektif, akuntabel, serta berlandaskan asas praduga tidak bersalah. Frame ini berfungsi untuk menjawab tuntutan publik atas transparansi, sekaligus mengelola ekspektasi mereka terhadap durasi penyelesaian kasus, sehingga legitimasi prosedural institusi tetap terjaga (Pan & Kosicki, 1993).

Ketiga, frame perlindungan korban yang muncul pada tahap akhir rangkaian komunikasi melalui penegasan keberpihakan institusi pada pemulihan korban serta rujukan pada regulasi perlindungan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Frame ini berfungsi sebagai strategi *rebuilding trust*, yaitu upaya aktif untuk merekonstruksi kepercayaan publik yang sempat tergoyahkan akibat krisis.

Ketiga frame tersebut sejalan dengan temuan komunikasi krisis pada bagian sebelumnya: ketika kejelasan, transparansi, responsivitas, dan kredibilitas pesan belum optimal pada tahap awal, institusi cenderung beralih pada kombinasi strategi *diminish* dan *rebuild* guna menjaga nilai ekonomi reputasinya (Coombs, 2007). Dengan demikian, efektivitas *press release* dalam komunikasi krisis tidak dapat dilepaskan dari fungsi ekonominya sebagai instrumen pemeliharaan aset reputasi kelembagaan perguruan tinggi.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas komunikasi krisis melalui *press release dalam kasus dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berdasar*kan hasil analisis terhadap pemberitaan media serta pernyataan resmi institusi, dapat disimpulkan bahwa komunikasi krisis yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Hal ini ditunjukkan oleh masih adanya keterbatasan dalam kejelasan, transparansi, responsivitas, dan kredibilitas informasi yang disampaikan.

Dari aspek kejelasan, informasi yang beredar di publik menunjukkan adanya perbedaan narasi antarmedia serta keterbatasan detail dalam komunikasi resmi, sehingga belum mampu memberikan pemahaman yang komprehensif kepada publik. Dari aspek transparansi, informasi yang disampaikan masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjelaskan proses penanganan kasus secara terbuka. Sementara itu, dari aspek responsivitas,

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

komunikasi yang dilakukan cenderung bersifat reaktif, sehingga tidak mampu mengendalikan perkembangan informasi sejak tahap awal krisis. Adapun dari aspek kredibilitas, ketidakkonsistenan informasi serta dominasi sumber non-resmi pada tahap awal krisis berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi.

Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi krisis tidak hanya ditentukan oleh penyampaian informasi semata, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam menyampaikan pesan secara jelas, transparan, cepat, dan konsisten. Dalam konteks ini, *press release* sebagai instrumen komunikasi resmi perlu didukung oleh strategi komunikasi yang lebih proaktif dan terintegrasi agar mampu mengendalikan narasi publik secara efektif.

Meskipun Universitas Indonesia telah mengeluarkan *press release* sebagai bentuk komunikasi resmi yang memuat informasi mengenai proses investigasi, perlindungan korban, serta mekanisme penanganan kasus, respons negatif masyarakat terhadap keputusan pemberian sanksi nonaktif sementara menunjukkan bahwa efektivitas *press release* dalam memulihkan kepercayaan publik masih belum optimal. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi krisis tidak hanya ditentukan oleh kecepatan dan kejelasan penyampaian informasi, tetapi juga oleh kesesuaian antara pesan yang disampaikan dengan tindakan nyata organisasi dalam memenuhi ekspektasi publik.

Oleh karena itu, organisasi perlu meningkatkan kualitas komunikasi krisis dengan menyusun pesan yang lebih komprehensif, memperkuat transparansi informasi, meningkatkan kecepatan respons, serta memastikan konsistensi antara komunikasi dan tindakan yang dilakukan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik serta meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh krisis di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al Zuhri, C. R., Salma, C. R., Ditya, D. D., Mulyani, W., Sarfika, D., Sahputra, A., Handayani, M., Kania, R., & Zahara, R. (2024). Pelatihan penulisan *press release* dengan metode komunikasi, informasi, dan edukasi guna mempersiapkan public relations specialist. Pena Dimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(2), 79–86.

Alivia, T., Sulistiya, A., Kustina, L., Apnil, R. N., Salsabilah, V. A. Q., & Sudadi. (2024). Strategi komunikasi humas di era digital. Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian, 6(1).

Anggraini, L. P., & Rahma, D. S. (2025). Strategi komunikasi krisis perusahaan dalam menghadapi isu negatif di media digital. Jurnal Media dan Komunikasi, 2(2), 40–45.

Apriandi, M. M., Maritasari, D. B., Maulida, B. Z. A., & Karmila, I. (2024). Kredibilitas sumber ilmiah di era digital. NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan, 5(3),

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

1261–1265.

A Ishak, “Peran Public Relations dalam Komunikasi Organisasi,” Jurnal Komunikasi Aspikom1,no.4(2012):375-385, https://jurnalaspikom.org/index.php/aspikom/article/download/38/38.

A Sinko,”The Importance of Public Relations in the System of the Creative Economy,” Ìntegrovanì Komunìkacìï17,no.1(2024):101-105,

BBC News Indonesia. (2026). Kasus pelecehan di FH UI dan dinamika ruang digital. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg544y6r4j7o

Coombs, W. T. (2007). Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding. SAGE Publications.

Coombs, W. T. (2019). Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding (5th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026). Kasus pelecehan di FH UI tak cukup dengan sanksi internal. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/MY-Esti-Kasus-Pelecehan-di-FH-UI-Tak-Cukup-Dapatkan-Sanksi-Internal-64484

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58.

Fombrun, C. J. (1996). Reputation: Realizing value from the corporate image. Harvard Business School Press.

JPNN. (2026). Pernyataan Universitas Indonesia soal dugaan pelecehan seksual di Fakultas Hukum. https://www.jpnn.com/news/pernyataan-universitas-indonesia-soal-dugaan-pelecehan-seksual-di-fakultas-hukum

Kompas TV. (2026). Kronologi terungkapnya kasus pelecehan seksual oleh mahasiswa FH UI.https://www.kompas.tv/nasional/663883/kronologi-terungkapnya-kasus-pelecehan-seksual-oleh-16-mahasiswa-fh-ui

LLDIKTI Wilayah V.(2026).Kasus pelecehan seksual di FH UI menegaskan bahwa ruang digital bukan zona bebas etika https://lldikti5.kemdiktisaintek.go.id/home/detailpost/kasus-pelecehan-seksual-di-fh-ui-menegaskan-bahwa-ruang-digital-bukan-zona-bebas-etika

Lattimore, D., Baskin, O., Heiman, S. T., & Toth, E. L. (2021). Public relations: The profession and the practice (8th ed.). McGraw-Hill.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). SAGE Publications.

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.

University Press.

Pan, Z., & Kosicki, G. M. (1993). Framing analysis: An approach to news discourse. Political Communication, 10(1), 55-75.

Parsons, P. (2023). Ethics in public relations: A guide to best practice (4th ed.). Kogan Page.

Permata, A. I., Abidin, S., & Kurnia, R. (2023). Pemanfaatan media relations dalam meningkatkan citra perusahaan. SNISTEK.

Putranto, U., Intani, R., & Handayani, M. (2023). Analisis press release sebagai strategi krisis pencurian data informasi pengguna Tokopedia. Jurnal Dinamika Ilmu Komunikasi, 9(2), 67–74. 4283-13706-1-PB.pdf

Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi: Dasar-dasar dan Aplikasi (Jakarta: Kencana, 2012).

Salma, N. A., Purnama, P. H., & Fujiasti, S. N. (2025). Efektivitas komunikasi digital dalam meningkatkan kepuasan dan retensi pelanggan UMKM sektor kuliner. Jurnal Komunikasi Universitas Garut, 11(1), 328–344.

Suara.com. (2026). Kronologi dugaan pelecehan seksual mahasiswa FH UI dan tuntutan publik. https://www.suara.com/news/2026/04/20/132445/kronologi-lengkap-dugaan-pelecehan-seksual-16-mahasiswa-fh-ui-publik-tuntut-pelaku-di-do

Copyright at authors some right reserved this work is licensedUnder a Creative Commons Attribuation-ShareAlike 4.0 International License.